



RENSTRA TAHUN 2025 - 2029

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/677-KUM/ 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437); yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLRI Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 – 2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terkait oleh ketentuan/ Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 26 Mei 2025

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008**

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR :100.3.3.2/677-KUM/2025
 TANGGAL :26 Mei 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANAH LAUT
 TAHUN 2025 - 2029

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris
4.	Kabid Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kabid Pengembangan Usaha Perikanan	Anggota
6.	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
7.	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Keuangan	Anggota
10.	Jabatan Fungsional Tertentu	Anggota
11.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH


 ALFIRIAL, SH, MH
 NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara garis besar, sederhana dan ringkas mengenai visi, misi, tujuan sasaran dan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dalam membantu Bupati Tanah Laut dalam penyelenggaraan tugas sesuai dengan fungsinya.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029 ini, dapat dijadikan sebagai pedoman rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsi serta tujuan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan serta petunjuknya, sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing - masing demi kemajuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut khususnya dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya.

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Tanah Laut,



MDH. KUSRI, S.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690315 199803 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal.	i
DAFTAR ISI		ii
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum		2
1.3. Maksud dan Tujuan		4
1.4. Sistematika		4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN SKPD, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....		6
2.1. Struktur Organisasi		6
2.2. Tugas dan Fungsi		7
2.3. Kinerja Pelayanan		17
2.4. Isu Strategis		17
2.5. Sumber Daya Perangkat Daerah		21
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		23
3.1. Tujuan dan Sasaran		23
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan		26
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		28
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		28
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang		49
BAB V. PENUTUP		51
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam mengembangkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Strategis ini merupakan turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut periode 2025 –2029 menyajikan agenda utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut untuk mengantisipasi masalah dan kendala berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2025 – 2029 yang diperkirakan akan muncul pada periode 5 (lima) tahun kedepan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini.

Rencana Strategis ini disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Pelayanan Dasar;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2009, tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
10. Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 2001 tentang "Dewan Ketahanan Pangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Berbasis Sumberdaya Lokal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kab. Tanah Laut Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut periode 2025 –2029 ini adalah :

1. Dijadikan sebagai arah kebijakan berbagai program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan Perikanan di Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai penjabaran *implementatif* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 – 2029;
3. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Sedangkan Tujuan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut periode 2025 –2029 ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun.
2. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis 5 (lima) tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan pada sektor ketahanan pangan dan sektor perikanan.
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan ketahanan pangan dan perikanan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.

1.4. Sistematika

Mengacu kepada Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanah Laut Nomor : 000.7.3/41/P2EPD/Baperida, Sistematika Penyajian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	2.6. Telaahan Rencana Strategis K/ L dan Rentra
	2.7. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

2.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 menetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang ketahanan pangan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPT Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka bagan struktur organisasi (dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 114 tahun 2021)

Struktur organisasi dari Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :

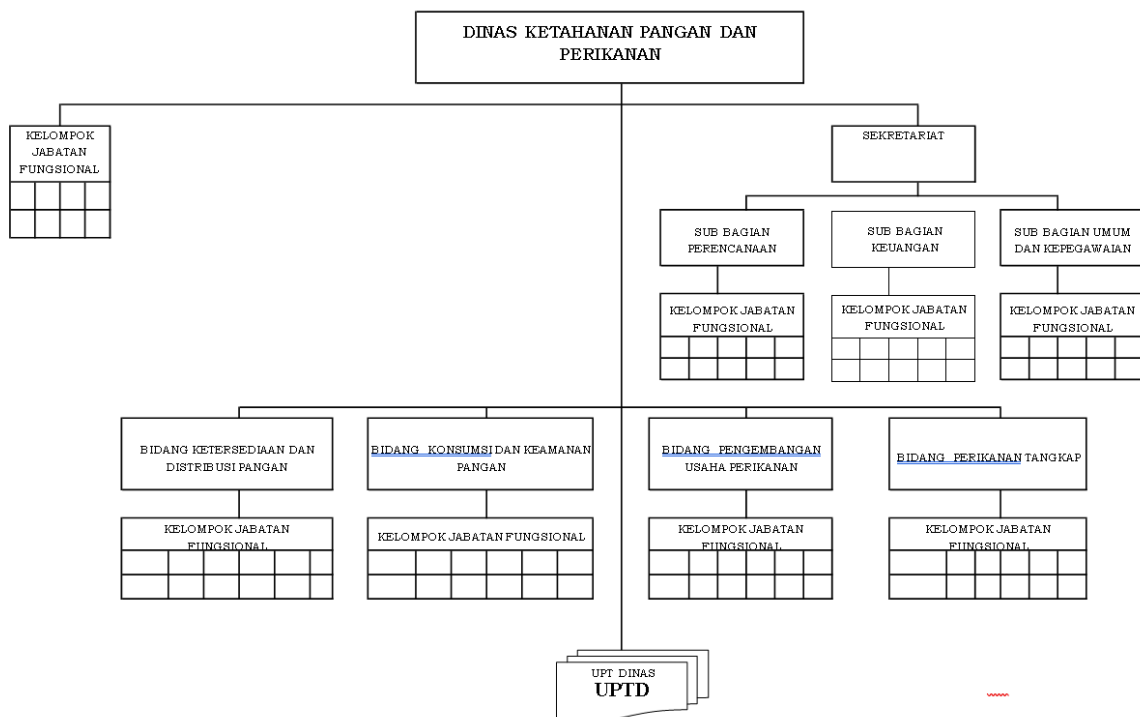
- a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan
 - f. Bidang Penguatan Perikanan Tangkap
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang ketahanan pangan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN



Untuk melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan perikanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
4. pelaksanaan administrasi dinas;
5. pembinaan UPT Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, administrasi dan kebutuhan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat membawahi dari:

a) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan administrasi keuangan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan kepegawaian.

b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

d. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

1. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan Usaha Perikanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pengembangan usaha perikanan;
 - b. perumusan kebijakan bidang pengembangan usaha perikanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengembangan usaha perikanan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan usaha perikanan;
 - e. pelaksanaan kebijakan perikanan budidaya;
 - f. pelaksanaan kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

- g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha perikanan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

e. Bidang Perikanan Tangkap

1. Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan tangkap.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perikanan tangkap;
 - b. perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perikanan tangkap;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan kebijakan kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan;
 - f. pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana penangkapan;
 - g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SkPD	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
					2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Skor PPH Ketersediaan	Skor			72	72,5	92,41		125%	
2	Skor PPH Konsumsi	Skor			90	91	88,6		95%	
3	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	%			2,5	2,5	2,95		105%	
4	Persentase Peningkatan Nilai Produk Olahan Perikanan	%			1,5	1,5%	1,5		100%	
5	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai			80.5	81	80,6		100%	
6	Persentase ketersediaan pangan	%	x		100	100	100		100%	
7	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	x		68.433	70.502	69.612		105%	

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan kondisi negatif yang terjadi dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan isu-

isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Beberapa permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, diantaranya :

1. Kurang Optimalnya sarana prasarana Perikanan Tangkap dan Illegal Fishing, serta destructive fishing;
2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan sektor perikanan dan sarana prasarana pengembangan usaha perikanan;
3. Belum adanya *cold storage* sebagai sarana pendukung usaha perikanan;
4. Belum ada Balai Benih perikanan sebagai penjamin keberlangsungan ketersediaan benih lingkup/local Kabupaten;
5. Belum terpenuhi sarana prasarana Ketahanan Pangan;
6. Belum optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

b. Telaahan Rencana Strategis K/ L dan Rentra

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029, tetap berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen dimaksud maka langkah-langkah untuk melakukan analisis juga menggunakan langkah-langkah dengan metode yang sama. Secara umum kebijakan, rencana dan program (KRP) yang terintegasi dalam matriks rencana, program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran dan penandanaan indikatif Tahun 2025-2029 tidak terdapat indikasi yang menyebabkan peluang kerusakan lingkungan skala makro maupun mikro. Karena kebijakan, rencana dan program (KRP) Perangkat Daerah yang direncanakan akan diselenggarakan Tahun 2025-2029. Pada Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi rutin

untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan umum dan pelayanan lainnya ke masyarakat secara langsung pada sektor ketahanan pangan dan sektor perikanan.

c. Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut memiliki peran krusial dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas, serta memajukan sektor perikanan di wilayah tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Adapun permasalahan pelayanan DKPP antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM);
2. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi SDM;
3. Kurangnya informasi yang mudah diakses.

d. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD sesuai dengan didasarkan pada faktor-faktor permasalahan pelayanan. Isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan;
2. Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan bagi nelayan dan pembudidaya ikan;
3. Minimnya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan;
4. Belum optimalnya pembentukan kelembagaan untuk nelayan;
5. Belum optimalnya akses permodalan pada sektor perikanan;
6. Masih kurangnya Sarana Prasarana bidang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tanah Laut;
7. Masih Kurangnya pengetahuan/pemahaman masyarakat terkait ketahanan pangan;
8. Belum beragamnya pola konsumsi ketahanan pangan Masyarakat;
9. Keterbatasan kemampuan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan dan gizi.

Dari beberapa permasalahan yang timbul dan isu strategis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel. 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
usaha budidaya ikan (KJA, Kolam Ikan, Tambak)	Kurang Optimalnya sarana prasarana Perikanan Tangkap dan Illegal Fishing, serta destructive fishing	Peningkatan aktivitas dari hulu (pertambangan dan perkebunan) berdampak pada kualitas air	Kerusakan lingkungan	Deforestasi dan pembangunan yang tidak terencana	pembukaan lahan baru untuk tambang dan perkebunan	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan
usaha penangkapan ikan (perairan umum dan laut)	Belum optimalnya pemanfaatan lahan sektor perikanan dan sarana prasarana pengembangan usaha perikanan	Kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan	Perubahan iklim berakibat peningkatan suhu global	perubahan pola curah hujan menyebabkan banjir dan kekeringan ekstrem	terganggunya produksi pertanian dan perikanan	Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan bagi nelayan dan pembudidaya ikan
						Minimnya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan
						Belum optimalnya pembentukan kelembagaan untuk nelayan
						Belum optimalnya akses permodalan pada sektor perikanan
Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Belum terpenuhi sarana prasarana Ketahanan Pangan	Peningkatan sumberdaya manusia dan ekonomi hijau	Menuju ketahanan pangan berkelanjutan	Pencapaian swasembada pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Masih kurangnya Sarana Prasarana bidang ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tanah Laut
	Belum optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)		Krisis pangan, rendahnya diversifikasi pangan, malnutrisi, dan food loss and waste	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU), Angka Stunting pada Balita	Penurunan Keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat karena konsumsi pangan bergizi seperti sayuran, buah dan protein hewani, dan upaya peningkatan konsumsi pangan non beras berbahan sumber daya pangan lokal	Masih Kurangnya pengetahuan/pemahaman masyarakat terkait ketahanan pangan
						Belum beragamnya pola konsumsi ketahanan pangan Masyarakat
						Keterbatasan kemampuan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan dan gizi

D. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dengan melaksanakan urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan didukung oleh 25 personil dengan latar belakang beragam tingkat pendidikan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongan. Kondisi kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut hingga Desember 2024 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029

Nama Jabatan	Bezzeting Pegawai Tahun	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Sekretaris		1	1	1	1	1	1	1
Kepala Sub Bagian Perencanaan		1	1	1	1	1	1	
Penelaan Teknis Kebijakan		1	1	1	1	1	1	1
Pengolahan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran		1	1	1	1	1	1	1
Perencana Ahli Pertama		1	1	1	1	1	1	1
Kepala Sub Bagian Keuangan		1	1	1	1	1	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan		1	1	1	1	1	1	1
Pengolahan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	1	1
Pengolahan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran		1	1	1	1	1	1	1
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1	1	1	1	1	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan		1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional		1	1	1	1	1	1	1
Pengolahan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran		2	2	2	2	2	2	2
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan		1	1	1	1	1	1	1
Analisis ketahanan Pangan Madya		2	2	2	2	2	2	2
Analisis ketahanan Pangan Muda		2	2	2	2	2	2	2
Analisis ketahanan Pangan Pertama		2	2	2	2	2	2	2
Penelaah Teknis Kebijakan		2	2	2	2	2	2	2
Pengolahan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	1	1
Pengolahan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	1	1
Pengolahan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	1	1

Pengadministrasi Perkantoran		1	1	1	1	1	1	1
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan		1	1	1	1	1	1	1
Analisis ketahanan Pangan Madya		2	2	2	2	2	2	2
Analisis ketahanan Pangan Muda		2	2	2	2	2	2	2
Analisis ketahanan Pangan Pertama		2	2	2	2	2	2	2
Penelaah Teknis Kebijakan		1	1	1	1	1	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan		1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional		1	1	1	1	1	1	1
Pengolahan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran		2	2	2	2	2	2	2
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Analisis Akuakultur Madya		2	2	2	2	2	2	2
Analisis Akuakultur Muda		2	2	2	2	2	2	2
Analisis Akuakultur Pertama		2	2	2	2	2	2	2
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Kepala Bidang Perikanan Tangkap		1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya		2	2	2	2	2	2	2
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda		2	2	2	2	2	2	2
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama		2	2	2	2	2	2	2
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan		1	1	1	1	1	1	1
Penata Kelola Kelautan dan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan		2	2	2	2	2	2	2
Pengadministrasi Perkantoran		2	2	2	2	2	2	2

Sumber : Data Kepegawaian DKPP Kab. tanah Laut

BAB III

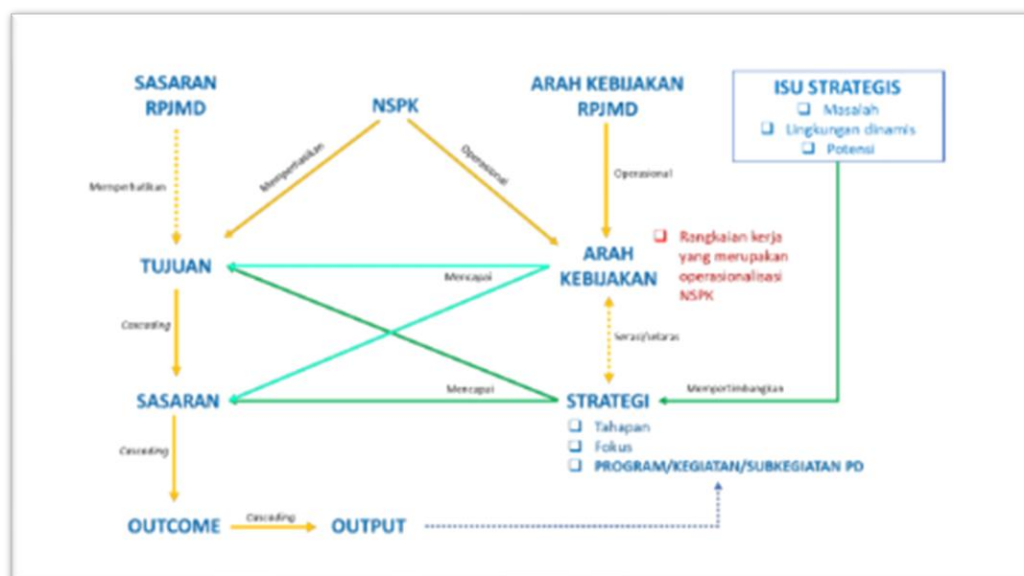
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

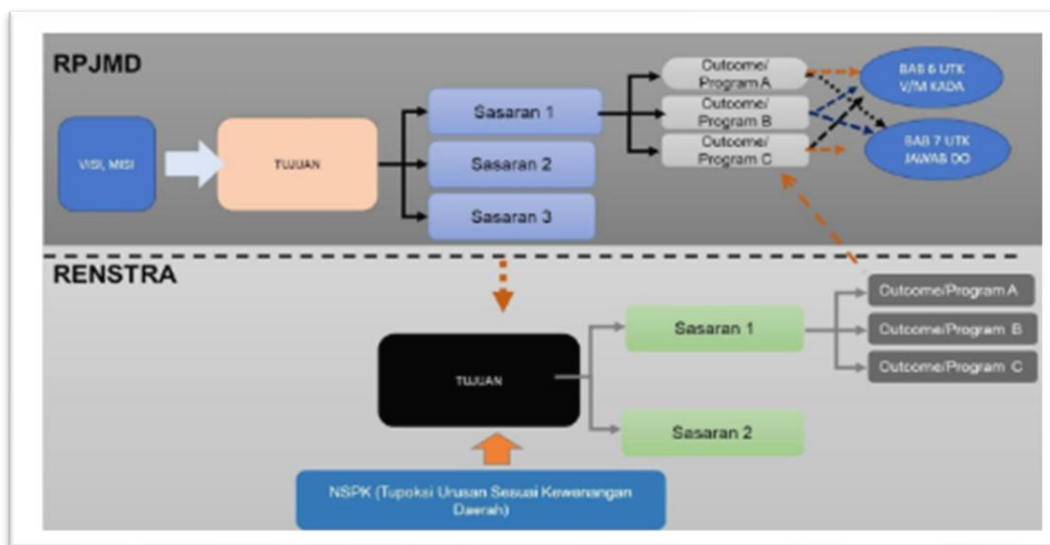
Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Adapun Konsep RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “**BERSAMA MEMBANGUN TANAH LAUT SIMPUN, MAJU DAN BERKELANJUTAN**” mengandung arti suatu kemampuan dan kemampuan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih. Konsep Renstra Perangkat Daerah dan Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan											
- Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan		Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	16,45	16,47	16,5	16,6	16,7	16,75	16,76	
		Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	80,59	81	82	82	83	83	83	
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	4,14	4	3,8	3,8	3,6	3,6	3,5	
		Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan (%)	2,95	2,5	3,1	3,2	3,2	3,4	4,0	

Tabel 3.4 Pentahapan RENSTRA

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Peningkatan SDM	Peningkatan SDM	Peningkatan SDM	Peningkatan SDM	Peningkatan SDM
Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Perumusan pernyataan strategi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih;
4. Menyusun strategi pengembangan dan keberagaman pertanian pangan lokal yang cukup berkelanjutan.

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel. 3.5.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1	2	3	4
	ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Peningkatan Ketersediaan pangan dan Hasil Perikanan, serta pengembangan pertanian dan keberagaman pangan lokal

Tabel. 3.6 Lokus Perangkat Daerah

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
	Kabupaten Tanah Laut	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Peningkatan Aksesibilitas dan Stabilitas Harga Pangan	
			Peningkatan Mutu, Keamanan, dan Diversifikasi Pangan Olahan	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	
			Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang Berkelanjutan	

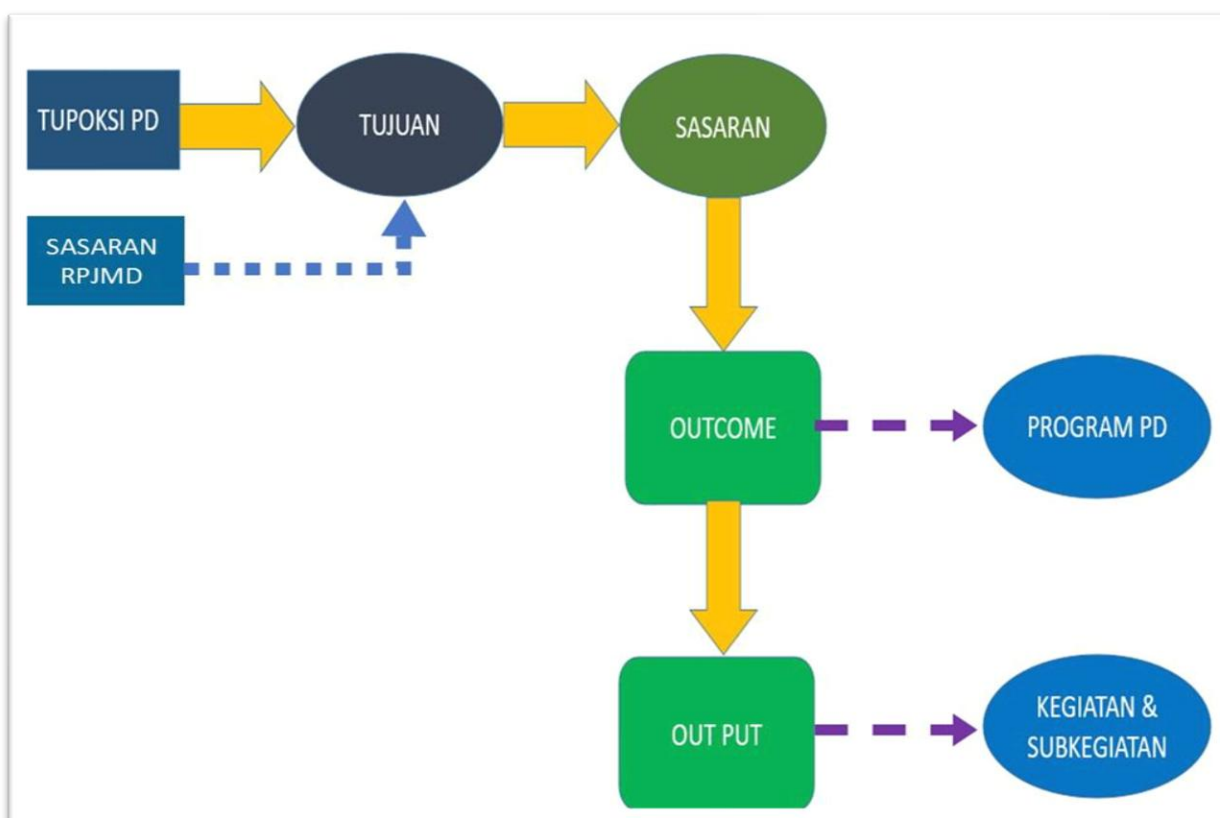
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tersaji pada Tabel dibawah ini.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan							
- Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan	Meningkatnya Ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang, aman bagi masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Pangan		Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)		
					Indeks Ketahanan Pangan (Angka)		
					Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		
					Skor PPH Ketersediaan (Skor)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana ketahanan pangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Konsumsi		Skor PPH Ketersediaan (Skor)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Skor PPH Konsumsi (Skor)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Jumlah Laporan Neraca Pangan Strategis	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
				Persentase Terpenuhinya Kelompok Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Menurunnya Desa Rawan Pangan		Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Konsumsi		Skor PPH Konsumsi (Skor)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
		Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan (%)		
			Meningkatnya kapasitas nelayan perikanan tangkap		Persentase Nelayan Tangkap yang Meningkatkan Produksinya (%)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Meningkatnya sarana prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Jumlah kelompok dan individu nelayan yang dilatih	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Jumlah nelayan yang terfasilitasi	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya		Persentase kelompok pembudidaya yang meningkatkan produksinya (%)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Jumlah kelompok yang dilatih	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Jumlah sarana dan prasarana yang dihibahkan sesuai ketentuan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Meningkatnya kapasitas nelayan perikanan tangkap		Persentase Nelayan Tangkap yang Meningkatkan Produksinya (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Volume Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
				volume produksi perikanan Budidaya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya produk hasil olahan perikanan		Persentase peningkatan produk olahan perikanan (%)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Jumlah kelompok yang dilatih		3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
						3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.130.620.555,19		9.163.000.000		9.238.000.000		9.248.500.000		9.453.500.000		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.421.377.543,71		6.833.000.000		6.903.000.000		6.903.500.000		6.938.500.000		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan internal perangkat daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	-	100	6.421.377.543,71	100	6.833.000.000	100	6.903.000.000	100	6.903.500.000	100	6.938.500.000	2.09.3.25.0.00.01.00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	80,6	80,8		81		81,2		81,4		81,8			
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.960.361		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	11.960.361	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	3		3		3		3		3			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.053.940		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	3	6.053.940	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000	3	6.000.000		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.906.421		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	5.906.421	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.017.857.314,3		5.056.000.000		5.106.000.000		5.106.000.000		5.106.000.000		
Persentase layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	5.017.857.314,3	5	5.056.000.000	5	5.106.000.000	5	5.106.000.000	5	5.106.000.000		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30		30		30		30		30			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.011.757.276		5.050.000.000		5.100.000.000		5.100.000.000		5.100.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	5.011.757.276	30	5.050.000.000	30	5.100.000.000	30	5.100.000.000	30	5.100.000.000		
2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.100.038,3		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	6.100.038,3	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	95	20	100.000.000	20	140.000.000	20	140.000.000	20	140.000.000	20	140.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	95	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				431.166.762,72		435.000.000		485.000.000		485.500.000		485.500.000		
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	100	431.166.762,72	100	435.000.000	100	485.000.000	100	485.500.000	100	485.500.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)													
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.000.462,3		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.462,3	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.069.356,07		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14	60.069.356,07	14	60.000.000	14	60.000.000	14	60.000.000	14	60.000.000		
2.09.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				14.953.792,35		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	14.953.792,35	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				14.582.292		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	14.582.292	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		3.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.500.000	2	3.500.000		
2.09.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				16.650.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	2	16.650.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000		
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000		
2.09.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6.910.860		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	100	6.910.860	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
2.09.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				542.594.505,69		310.000.000		300.000.000		300.000.000		320.000.000		
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	64	20	542.594.505,69	20	310.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	320.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		-		-		-					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		2		2		2					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
2.09.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				47.230.500		60.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	64	20	47.230.500	20	60.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.09.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				282.626.955,69		250.000.000		250.000.000		250.000.000		270.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	282.626.955,69	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	270.000.000		
2.09.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				212.737.050		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	212.737.050	-	0	-	0	-	0	-	0		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98.885.600		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	-	98.885.600	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.885.600		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	98.885.600	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	-	0	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				218.913.000		330.000.000		310.000.000		310.000.000		325.000.000		
Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	218.913.000	2	330.000.000	2	310.000.000	2	310.000.000	2	325.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	25		25		25		25		25			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27	25		25		25		25		25			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				37.500.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	37.500.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				166.927.500		200.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	17	25	166.927.500	25	200.000.000	25	180.000.000	25	180.000.000	25	180.000.000		
2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.485.500		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	27	25	14.485.500	25	15.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		75.000.000		75.000.000		75.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	0	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	90.000.000		
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				1.398.389.845,71		795.000.000		795.000.000		795.000.000		845.000.000		
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	92,41	92,42	1.398.389.845,71	92,43	795.000.000	92,45	795.000.000	92,48	795.000.000	92,5	845.000.000	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.398.389.845,71		795.000.000		795.000.000		795.000.000		845.000.000		
Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana ketahanan pangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	1	5	1.398.389.845,71	1	795.000.000	1	795.000.000	1	795.000.000	1	845.000.000		
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				143.338.755		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	143.338.755	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000		
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1.255.051.090,71		650.000.000		650.000.000		650.000.000		700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	1	5	1.255.051.090,71	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				980.015.378,05		1.200.000.000		1.205.000.000		1.215.000.000		1.320.000.000		
Meningkatnya Kualitas Konsumsi	Skor PPH Ketersediaan (Skor)	92,41	92,42	980.015.378,05	92,43	1.200.000.000	92,45	1.205.000.000	92,48	1.215.000.000	92,5	1.320.000.000	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
	Skor PPH Konsumsi (Skor)	88,6	90,5		91		91		91,5		91,5			
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				224.958.355		255.000.000		255.000.000		255.000.000		255.000.000		
Jumlah Laporan Neraca Pangan Strategis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	50	224.958.355	50	255.000.000	50	255.000.000	50	255.000.000	50	255.000.000		
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				99.116.195		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	50	50	99.116.195	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				94.185.660		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	-	1	94.185.660	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				31.656.500		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	1	31.656.500	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					0		0		0		0		0	
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	0		0		0		0		0		0	
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				552.438.860		700.000.000		700.000.000		700.000.000		800.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	7	52,89	552.438.860	52,89	700.000.000	52,89	700.000.000	52,89	700.000.000	52,89	800.000.000		
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	40	40		52,89		52,89		52,89		52,89			
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				504.320.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		750.000.000		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	40	40	504.320.000	52,89	650.000.000	52,89	650.000.000	52,89	650.000.000	52,89	750.000.000		
2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				48.118.860		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	7	52,89	48.118.860	52,89	50.000.000	52,89	50.000.000	52,89	50.000.000	52,89	50.000.000		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				202.618.163,05		245.000.000		250.000.000		260.000.000		265.000.000		
Persentase Terpenuhinya Kelompok Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	202.618.163,05	1	245.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000	1	265.000.000		
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				24.940.575		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	24.940.575	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				107.683.260		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	107.683.260	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				69.994.328,05		70.000.000		75.000.000		85.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	69.994.328,05	1	70.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				109.849.719,75		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Menurunnya Desa Rawan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rentan Rawan Pangan (%)	100	100	109.849.719,75	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				109.849.719,75		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Persentase daerah rawan pangan yang ditangani	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	109.849.719,75	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000		
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1		1		1							
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.430.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	8.430.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				101.419.719,75		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	101.419.719,75	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				220.988.067,97		225.000.000		225.000.000		225.000.000		240.000.000		
Meningkatnya Kualitas Konsumsi	Skor PPH Konsumsi (Skor)	88,6	90,5	220.988.067,97	91	225.000.000	91	225.000.000	91,5	225.000.000	91,5	240.000.000	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				220.988.067,97		225.000.000		225.000.000		225.000.000		240.000.000		
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	220.988.067,97	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	240.000.000		
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1							
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				126.999.863,97		130.000.000		130.000.000		130.000.000		140.000.000		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	126.999.863,97	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000		
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				93.988.204		95.000.000		95.000.000		95.000.000		100.000.000		
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	93.988.204	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.356.230.845		3.185.995.424,37		3.234.485.378,61		3.223.985.378,61		3.517.884.793,76		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.235.278.625		1.905.000.000		1.905.000.000		1.910.000.000		2.080.000.000		
Meningkatnya kapasitas nelayan perikanan tangkap	Persentase Nelayan Tangkap yang Meningkatkan Produksinya (%)	0	3,1	1.235.278.625	3,2	1.905.000.000	3,2	1.905.000.000	3,4	1.910.000.000	4	2.080.000.000	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				35.575.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		
Meningkatnya sarana prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	325	-	35.575.000	1.140	40.000.000	1.140	40.000.000	1.140	40.000.000	1.140	50.000.000		
	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				35.575.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	35.575.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	325	-	0	1.140	0	1.140	0	1.140	0	1.140	0		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.199.703.625		1.865.000.000		1.865.000.000		1.870.000.000		2.030.000.000		
Jumlah kelompok dan individu nelayan yang dilatih	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	120	120	144.835.165	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000		
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				144.835.165		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	120	120	144.835.165	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000	120	200.000.000		
Jumlah nelayan yang terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	-	600	1.054.868.460	550	1.665.000.000	575	1.665.000.000	600	1.670.000.000	600	1.830.000.000		
	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5	10		10		10		10		10			
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				23.510.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5	10	23.510.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				37.925.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	2	4	37.925.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				993.433.460		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.750.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	-	600	993.433.460	550	1.600.000.000	575	1.600.000.000	600	1.600.000.000	600	1.750.000.000		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				705.988.720		800.000.000		825.000.000		825.000.000		950.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Pembudidaya	Persentase kelompok pembudidaya yang meningkat produksinya (%)	0	3,1	705.988.720	3,2	800.000.000	3,2	825.000.000	3,4	825.000.000	4	950.000.000	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				48.485.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Jumlah kelompok yang dilatih	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	2	2	48.485.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	10		10		10		10		10			
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				48.485.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	10	10	48.485.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000		
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				0		0		0		0		0		
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				657.503.720		750.000.000		775.000.000		775.000.000		900.000.000		
Jumlah sarana dan prasarana yang dihibahkan sesuai ketentuan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	36	14	657.503.720	10	750.000.000	10	775.000.000	10	775.000.000	10	900.000.000		
	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20	0		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				657.503.720		750.000.000		775.000.000		775.000.000		900.000.000		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	36	14	657.503.720	10	750.000.000	10	775.000.000	10	775.000.000	10	900.000.000		
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0		0		0		0		0		
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	20	0	0	20	0	20	0	20	0	20	0		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				258.771.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000		
Meningkatnya kapasitas nelayan perikanan tangkap	Persentase Nelayan Tangkap yang Meningkatkan Produksinya (%)	0	3,1	258.771.000	3,2	285.000.000	3,2	285.000.000	3,4	285.000.000	4	285.000.000	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				258.771.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000		
volume produksi perikanan Budidaya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	20	80.586.000	20	85.000.000	20	85.000.000	20	85.000.000	20	85.000.000		
	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	25		25		25		25		25			
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				71.751.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terawasnya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	25	71.751.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000	25	75.000.000		
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				8.835.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	0	20	8.835.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000		
Volume Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	10	115	178.185.000	115	200.000.000	115	200.000.000	115	200.000.000	115	200.000.000		
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				178.185.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	10	115	178.185.000	115	200.000.000	115	200.000.000	115	200.000.000	115	200.000.000		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				156.192.500		195.995.424,37		219.485.378,61		203.985.378,61		202.884.793,76		
Meningkatnya produk hasil olahan perikanan	Persentase peningkatan produk olahan perikanan (%)	1,5	1,5	156.192.500	1,5	195.995.424,37	1,5	219.485.378,61	1,5	203.985.378,61	1,5	202.884.793,76	2.09.3.25.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				156.192.500		195.995.424,37		219.485.378,61		203.985.378,61		202.884.793,76		
Jumlah kelompok yang dilatih				0		0		0		0		0		
Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	1,5	1,5	156.192.500	1,5	195.995.424,37	1,5	219.485.378,61	1,5	203.985.378,61	1,5	202.884.793,76		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				156.192.500		195.995.424,37		219.485.378,61		203.985.378,61		202.884.793,76		
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	1,5	1,5	156.192.500	1,5	195.995.424,37	1,5	219.485.378,61	1,5	203.985.378,61	1,5	202.884.793,76		

Tabel 4.4 Daftar Program/Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029.

Hal tersebut sebagai bentuk komitmen dan dukungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diatas maka ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.09.3.25.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan									
2.	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	%	2,95	2,5	3,1	3,2	3,2	3,4	4,0	
3.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	80,59	81	82	82	83	83	83	
4.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	4,14	4	3,8	3,8	3,6	3,6	3,5	
5.	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase	-	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,6	80,6	80,8	81	81,2	81,4	81,8	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	positif	Persentase	-	80	85	85	90	90	90	
4.	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Nilai	88,6	90	90,5	91	91	91,5	91,5	
5.	Persentase cadangan pangan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
7.	Produksi Perikanan Budidaya	positif	Ton	2.587,36	2.639	2.691	2.745	2.800	2.856	2.900	
8.	Produksi Perikanan Tangkap	positif	Ton	67.026	67.862	68.921	70.056	71.107	72.169	73.257	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu yang disusun berdasarkan program Pembangunan Daerah dan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka, menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut, serta menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi kinerja yang akan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Dalam Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan berlaku. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya penyesuaian pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 – 2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis ini merupakan merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Tanah Laut serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut. Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut sangat bergantung pada komitmen jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja dimasa yang akan datang kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pelaihari, 1 September 2025

